

PRAKTIK MANAJEMEN PENGELOLAAN BLT DI DESA ANGGARAKSA

Rabiatul Adawiyah¹, Hanapi², Abdul Latif³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Hamzanwadi
Email: adawiyahrabiatuladawiyah545@gmail.com; hanapi@hamzanwadi.ac.id;
abdullatif@hamzanwadi.ac.id

Artikel histori:

Submit: 04-06-2024

Revisi: 25-06-2024

Diterima: 27-06-2024

Terbit: 30-06-2024

Kata Kunci:

BLT Dana Desa,
manajemen bantuan sosial,
transparansi,
Pemerintah Desa
Anggaraksa

Korespondensi:

abdullatif@hamzanwadi.ac.id

Abstrak: This study examines the management practice of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) in Anggaraksa Village, Pringgabaya District, East Lombok Regency, and its social, economic, religious, and political impacts. The study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, with source triangulation used to strengthen data validity. The findings show that BLT management in Anggaraksa was organized through a sequence of village deliberation, beneficiary identification, data verification and validation, determination and publication of beneficiary lists, distribution, and reporting. The village government formed a volunteer team, involved the village consultative body, community, religious and youth leaders, and coordinated with higher-level government institutions. The practice emphasized transparency, fairness, effectiveness, and accountability. Nevertheless, implementation faced limitations in village budgets, incomplete poverty data, technological constraints among some beneficiaries, and the exclusion of some households because of eligibility and overlapping social assistance programs. BLT produced direct economic benefits by helping households meet basic needs and children's educational expenses. Socially, however, unequal access generated jealousy and, in some cases, perceptions of dependency on assistance. Religious interpretations emphasized gratitude and the moral obligation to distribute aid to eligible households. Politically, the study identifies community perceptions of possible politicization of social assistance, particularly around electoral periods. From a sociological perspective, the practice illustrates how state redistribution is mediated by local institutions, participation, social norms, and unequal access to economic and social resources.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk melindungi rumah tangga miskin dan rentan ketika terjadi tekanan ekonomi. Dalam konteks pandemi Covid-19, dana desa dialihkan sebagian untuk membantu masyarakat yang kehilangan pendapatan atau mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Di tingkat desa, kebijakan tersebut tidak berhenti pada keputusan pemerintah pusat, tetapi harus diterjemahkan ke dalam praktik administratif dan sosial: siapa yang didata, siapa yang ditetapkan sebagai penerima, bagaimana proses verifikasi dilakukan, bagaimana bantuan disalurkan, serta bagaimana pemerintah desa mempertanggungjawabkan penggunaan dana. Karena itu, keberhasilan BLT tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana, tetapi juga oleh kualitas manajemen, transparansi, partisipasi, dan kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, merupakan salah satu lokasi pelaksanaan BLT-DD yang menarik dikaji karena karakter sosial ekonominya beragam. Desa ini memiliki luas wilayah 380,28 hektare dengan 3.461 penduduk dan 1.125 kepala keluarga berdasarkan pemutakhiran data 2023. Struktur mata pencaharian masih kuat pada sektor pertanian dan buruh tani. Kondisi tersebut membuat bantuan tunai memiliki arti penting bagi rumah tangga yang pendapatannya tidak selalu stabil. Pada saat yang sama, keterbatasan anggaran desa menyebabkan tidak seluruh warga yang merasa membutuhkan dapat menjadi penerima. Situasi tersebut membuka ruang bagi persoalan sosial seperti kecemburuan, kesalahpahaman, dan penilaian terhadap keadilan pemerintah desa.

Latar belakang penelitian menunjukkan adanya dua persoalan yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, BLT dibutuhkan untuk menjaga kemampuan rumah tangga miskin memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, mekanisme pendataan dan penyaluran dapat menimbulkan ketegangan ketika masyarakat tidak memahami kriteria penerima atau ketika data kemiskinan tidak sepenuhnya mutakhir. Skripsi sumber juga mencatat kekhawatiran mengenai transparansi, kemungkinan nepotisme, dan politisasi bantuan sebagai isu yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan bantuan sosial. Namun, hasil penelitian lapangan justru menunjukkan bahwa praktik di Desa Anggaraksa pada saat penelitian telah berupaya mengatasi persoalan tersebut melalui musyawarah desa, pembentukan relawan, verifikasi dan validasi data, serta pelaporan dan dokumentasi.

Secara akademik, kajian tentang BLT penting karena bantuan sosial merupakan arena perjumpaan antara kebijakan negara dan kehidupan sosial masyarakat. Anam et al. (2023) menunjukkan bahwa dana desa dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, tetapi efektivitasnya tetap dipengaruhi kapasitas administratif, koordinasi, partisipasi, dan mekanisme akuntabilitas. Penelitian mengenai pemerintahan desa juga menunjukkan bahwa transparansi memiliki hubungan penting dengan kepercayaan masyarakat, sedangkan akuntabilitas dan kapasitas organisasi menjadi unsur yang menentukan kualitas tata kelola (Sofyani et al., 2021). Dengan demikian, praktik pengelolaan BLT dapat dibaca bukan semata-mata sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai praktik sosial yang membentuk hubungan pemerintah dan warga.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik manajemen pengelolaan BLT di Desa Anggaraksa dan menganalisis dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Fokus analisis diarahkan pada mekanisme pendataan, penetapan, penyaluran, pelaporan, peran pemerintah desa, serta pro-kontra program. Dampak dikaji dalam empat ranah yang ditemukan dalam penelitian lapangan, yaitu ekonomi, sosial budaya, agama, dan politik-pemerintahan. Pertanyaan tersebut sekaligus memungkinkan penelitian melihat hubungan antara distribusi bantuan, prinsip keadilan sosial, dan pengalaman konkret masyarakat penerima maupun nonpenerima.

KAJIAN LITERATUR

Manajemen dan Pengelolaan Bantuan Sosial

Manajemen dalam penelitian ini dipahami sebagai proses mengatur sumber daya dan aktivitas agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Terry (2012) menempatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai fungsi yang saling berhubungan. Dalam pengelolaan BLT, fungsi tersebut tampak pada penyusunan mekanisme pendataan, pembentukan tim pelaksana, penetapan penerima, distribusi bantuan, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen tidak hanya menyangkut siapa melakukan apa, tetapi juga bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana proses tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan bantuan sosial juga berkaitan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berarti informasi mengenai prosedur, kriteria, dan penerima bantuan dapat diketahui serta dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik. Studi mengenai pemerintah desa di Indonesia menunjukkan bahwa transparansi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, sementara kapasitas dan komitmen aparatur berpengaruh terhadap kualitas akuntabilitas (Sofyani et al., 2021). Karena itu, musyawarah desa dan keterlibatan unsur masyarakat bukan hanya prosedur formal, tetapi juga mekanisme sosial untuk membangun legitimasi keputusan.

Dalam konteks BLT-DD, pengelolaan juga harus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan kriteria penerima. Bantuan yang bersumber dari dana desa tidak dapat dibagikan secara merata kepada semua warga karena terdapat kelompok sasaran dan aturan yang harus dipenuhi. Akibatnya, prinsip keadilan tidak identik dengan pembagian yang sama rata, melainkan pembagian berdasarkan kriteria dan kebutuhan yang telah disepakati. Di sinilah transparansi menjadi penting agar perbedaan antara penerima dan nonpenerima dapat dijelaskan secara terbuka.

Teori Sosialisme Karl Marx

Skripsi sumber menggunakan sosialisme Karl Marx sebagai teori utama untuk membaca pengelolaan BLT. Dalam kerangka ini, perhatian diarahkan pada persoalan ketimpangan, distribusi sumber daya, kebutuhan dasar, dan peran negara dalam mengatur distribusi. Bantuan tunai dapat dilihat sebagai bentuk intervensi redistributif yang ditujukan kepada kelompok yang mengalami kerentanan ekonomi. Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa proses penentuan penerima menjadi penting: distribusi bantuan menyangkut siapa yang

memperoleh akses terhadap sumber daya publik dan siapa yang belum memperoleh akses tersebut.

Penggunaan perspektif Marx dalam artikel ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan BLT dengan sosialisme sebagai sistem ekonomi, tetapi untuk mempertajam analisis tentang fungsi redistribusi dan keadilan sosial. Pemerintah desa bertindak sebagai institusi yang mengatur distribusi bantuan, sedangkan masyarakat berada dalam posisi yang berbeda berdasarkan kondisi ekonomi dan status kelayakan. Ketika bantuan berhasil memenuhi kebutuhan dasar, fungsi redistributif terlihat secara langsung. Sebaliknya, ketika akses dianggap tidak adil, muncul kecemburuan dan konflik persepsi mengenai distribusi sumber daya.

Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu

Bourdieu digunakan sebagai teori pendukung untuk memahami bahwa pengelolaan BLT berlangsung dalam suatu arena sosial yang mempertemukan pemerintah desa, perangkat kewilayahan, tokoh masyarakat, dan warga penerima maupun nonpenerima. Praktik tidak hanya dibentuk oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh habitus, modal, dan posisi aktor dalam arena. Modal ekonomi berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan, modal sosial tercermin dalam jaringan dan hubungan kemasyarakatan, modal budaya berkaitan dengan pengetahuan mengenai prosedur bantuan, sedangkan modal simbolik dapat muncul melalui kepercayaan dan legitimasi terhadap pemerintah desa.

Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa komunikasi dan musyawarah memiliki posisi penting. Warga yang memahami mekanisme bantuan cenderung lebih mudah menerima keputusan, sementara warga yang kurang memahami prosedur dapat menilai keputusan sebagai ketidakadilan. Dengan demikian, transparansi bukan hanya persoalan membuka informasi, tetapi juga kemampuan institusi menerjemahkan aturan ke dalam bahasa dan mekanisme yang dapat dipahami masyarakat. Praktik pengelolaan BLT menjadi hasil interaksi antara struktur kebijakan dan tindakan aktor lokal.

Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Penelitian Fitriani et al. (2021) mengenai BLT-DD di Desa Landungsari menunjukkan pentingnya transparansi pendataan dan verifikasi data. Febriadi (2022) menemukan bahwa ketidaksesuaian data penerima dapat memunculkan konflik antara masyarakat dan pemerintah. Arimbawa yang dirujuk dalam skripsi juga menyoroti persoalan inkonsistensi regulasi dan kesulitan menentukan keluarga penerima manfaat. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan BLT bukan hanya soal penyaluran uang, tetapi juga soal kualitas data dan hubungan pemerintah dengan warga.

Penelitian yang lebih mutakhir memperluas persoalan tersebut. Studi tentang perlindungan sosial pada masa pandemi juga menempatkan BLT sebagai instrumen untuk menjaga kemampuan rumah tangga menghadapi tekanan ekonomi, sementara penelitian mengenai transparansi BLT menekankan pentingnya keterbukaan dalam pelaksanaan program (Iping, 2020; Hariandja & Budiman, 2020). Anam et al. (2023) menunjukkan bahwa dana desa memiliki potensi mengurangi kemiskinan, tetapi manfaatnya berbeda antarwilayah dan masih dibatasi kapasitas administrasi serta mekanisme akuntabilitas. Arifin et al. (2020) menunjukkan hubungan antara dana desa, kelembagaan ekonomi desa, dan kesempatan kerja. Permatasari et al. (2021) menekankan pentingnya melihat dana

desa melalui tujuan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, penelitian mengenai tata kelola desa menunjukkan bahwa transparansi, pengendalian internal, partisipasi, dan akuntabilitas merupakan komponen penting untuk mencegah penyalahgunaan dana publik (Putri et al., 2024; Safitri & Respati, 2023). Posisi penelitian ini terletak pada pembacaan sosiologis terhadap praktik BLT di tingkat desa, dengan menghubungkan prosedur manajemen, distribusi sumber daya, dan dampak sosial yang dirasakan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berupaya memahami praktik pengelolaan BLT sebagaimana berlangsung dalam konteks sosial Desa Anggaraksa, termasuk pengalaman aparat desa dan masyarakat. Lokasi penelitian adalah Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada keberadaan program BLT dan keterjangkauan lokasi penelitian sebagaimana dijelaskan dalam skripsi sumber.

Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Anggaraksa yang mengalami atau berinteraksi dengan praktik pengelolaan BLT. Informan yang disebutkan secara eksplisit dalam bagian hasil penelitian meliputi Hunaedi, A.Md. selaku Sekretaris Desa Anggaraksa, Suhar, S.Sos. selaku kepala dusun, dan Fajriatul selaku masyarakat penerima bantuan. Selain itu, penelitian menyebut keterlibatan perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala dusun, RT/RW, serta unsur masyarakat dalam proses musyawarah dan pendataan. Pemilihan informan diarahkan pada aktor yang mengetahui proses pendataan, penetapan, penyaluran, dan dampak bantuan.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memahami proses dan perilaku yang berkaitan dengan pengelolaan bantuan. Wawancara digunakan untuk memperoleh penjelasan dari aparat desa dan warga mengenai mekanisme pengelolaan, manfaat bantuan, serta persoalan yang muncul. Dokumentasi digunakan untuk menelusuri bukti administratif dan historis, termasuk dokumen, daftar penerima, serta dokumentasi kegiatan. Wawancara lapangan yang dikutip dalam skripsi berlangsung pada 20-21 Juni 2024.

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi. Peneliti membandingkan informasi dari sumber yang berbeda dan menghubungkannya dengan dokumen serta hasil pengamatan. Analisis data berlangsung sejak sebelum memasuki lapangan, selama pengumpulan data, dan setelah pengumpulan data. Proses analisis mengikuti tiga alur utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan praktik pengelolaan dan dampak BLT. Data kemudian disajikan dalam uraian tematik untuk melihat hubungan antara mekanisme kebijakan, tindakan pemerintah desa, dan respons masyarakat. Kesimpulan ditarik setelah temuan dibandingkan dan diverifikasi secara berulang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Sosial Ekonomi Desa Anggaraksa

Desa Anggaraksa memiliki luas wilayah 380,28 hektare yang terdiri atas persawahan 160 hektare, perkebunan 110 hektare, perkantoran 0,08 hektare, perkuburan 2,60 hektare, dan prasarana lainnya 6,60 hektare. Secara demografis,

data pemutakhiran 2023 mencatat 3.461 penduduk, terdiri atas 1.702 laki-laki dan 1.759 perempuan, dengan 1.125 kepala keluarga. Struktur mata pencaharian memperlihatkan ketergantungan yang kuat pada pertanian dan buruh tani. Terdapat 374 petani dan 701 buruh tani, sedangkan pekerjaan lainnya mencakup PNS, peternak, pedagang, pengusaha, tenaga kesehatan, dan pekerjaan lain.

Kondisi tersebut penting bagi pemahaman mengenai BLT karena kerentanan ekonomi tidak berdiri sendiri. Rumah tangga yang menggantungkan pendapatan pada pertanian dan buruh lebih sensitif terhadap gangguan ekonomi. Pada saat pandemi, keterbatasan mobilitas dan aktivitas ekonomi memperbesar kebutuhan terhadap perlindungan sosial. Dalam konteks desa, bantuan tunai menjadi salah satu instrumen untuk menjaga kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar. Data penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan bantuan terutama untuk kebutuhan pokok dan biaya pendidikan anak, bukan untuk investasi usaha berskala besar.

Secara sosial budaya, masyarakat Anggaraksa mayoritas Sasak dan seluruh penduduk dalam data desa beragama Islam. Tradisi keagamaan dan adat masih berjalan berdampingan, termasuk kegiatan keagamaan dan tradisi sosial seperti tahlilan, nyiwaq, nyatus, nyiu, serta kegiatan adat lainnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan terhadap kebijakan publik berlangsung dalam masyarakat yang memiliki jaringan sosial, norma keagamaan, dan hubungan antarwarga yang kuat. Oleh karena itu, persepsi tentang keadilan dan amanah pemerintah menjadi bagian penting dari penerimaan masyarakat terhadap BLT.

Praktik Manajemen Pengelolaan BLT

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BLT di Desa Anggaraksa berlangsung melalui tahapan yang relatif terstruktur. Pemerintah desa tidak langsung menyalurkan dana, tetapi terlebih dahulu melakukan musyawarah, membentuk tim relawan, mengidentifikasi calon penerima, melakukan verifikasi dan validasi, menetapkan daftar penerima, mengumumkan hasil, menyalurkan bantuan, dan menyusun laporan pertanggungjawaban. Pola tersebut memperlihatkan bahwa manajemen bantuan merupakan rangkaian proses yang saling berkaitan.

Musyawarah desa menjadi tahap awal yang memiliki fungsi administratif sekaligus sosial. Dalam musyawarah, pemerintah desa melibatkan BPD, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala dusun, dan unsur masyarakat lainnya. Keterlibatan tersebut dimaksudkan untuk menyepakati kriteria dan calon penerima serta mengurangi kesalahpahaman. Hunaedi menjelaskan bahwa penetapan KPM dilakukan melalui musyawarah desa sebelum daftar dilaporkan kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan pengesahan. Praktik ini menunjukkan bahwa distribusi bantuan dibangun melalui keputusan kolektif, bukan hanya keputusan sepihak aparat desa.

Tahap pendataan juga menggunakan dua sumber. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi salah satu acuan, tetapi pemerintah desa juga melakukan pendataan langsung atau door to door untuk memperoleh kondisi faktual masyarakat. Verifikasi dan validasi diperlukan karena data kemiskinan dapat berubah. Dengan demikian, praktik pengelolaan di Anggaraksa memperlihatkan kombinasi antara basis data administratif dan pengetahuan lokal aparat serta masyarakat mengenai kondisi rumah tangga.

Setelah verifikasi, daftar calon penerima dibahas kembali melalui musyawarah desa khusus. Daftar ditandatangani oleh kepala desa dan BPD, kemudian diumumkan melalui perangkat kewilayahan seperti kepala dusun dan RT/RW. Setelah mendapatkan pengesahan pemerintah daerah, bantuan disalurkan di kantor desa. Dalam praktik penyaluran, masyarakat menerima undangan dan diminta membawa dokumen yang diperlukan. Bagi penerima yang mengalami kesulitan menggunakan ATM, pemerintah desa berkoordinasi dengan pihak bank untuk membantu proses pembuatan dan penggunaan rekening.

Tahap terakhir adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemerintah desa menyusun laporan yang memuat nama, alamat, kondisi ekonomi penerima, serta dokumentasi penyaluran. Laporan disampaikan kepada pemerintah daerah melalui camat. Praktik ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan siklus manajemen. Temuan mengenai pelaporan desa juga menunjukkan bahwa bukti kegiatan, keterbukaan, dan kapasitas aparatur menjadi unsur penting dalam mempertahankan akuntabilitas (Hasanah & Yanto, 2021). Bukan hanya dana yang harus disalurkan, tetapi prosesnya juga harus meninggalkan jejak administratif yang dapat diperiksa.

Tahap	Praktik di Desa Anggaraksa	Nilai Tata Kelola
1. Musyawarah	Pembentukan tim, penyepakatan kriteria dan pembahasan calon penerima	Partisipasi dan transparansi
2. Pendataan	Pemanfaatan DTKS dan pendataan faktual di lapangan	Ketepatan sasaran
3. Verifikasi	Pemeriksaan dan koreksi data calon penerima	Validitas data
4. Validasi & penetapan	Musyawarah khusus, tanda tangan kepala desa dan BPD	Legitimasi dan keadilan
5. Publikasi	Pengumuman melalui kepala dusun/RT/RW	Keterbukaan informasi
6. Penyaluran	Penyerahan bantuan melalui mekanisme rekening dan kantor desa	Efektivitas layanan
7. Pelaporan	Dokumentasi, daftar penerima, dan laporan kepada pemerintah daerah	Akuntabilitas

Peran Pemerintah Desa: Regulator, Pelaksana, dan Penghubung

Peran pemerintah desa dalam penelitian ini dapat dilihat pada tiga fungsi. Pertama, pemerintah desa berfungsi sebagai regulator lokal yang menerjemahkan ketentuan pemerintah pusat dan daerah ke dalam prosedur desa. Kedua, pemerintah desa menjadi pelaksana yang mengorganisasi pendataan, verifikasi, penyaluran, dan pelaporan. Ketiga, pemerintah desa menjadi penghubung antara kebijakan dan masyarakat melalui sosialisasi, musyawarah, dan komunikasi. Tiga fungsi tersebut membuat kualitas hubungan pemerintah-warga menjadi bagian penting dari keberhasilan program.

Praktik komunikasi terlihat dari sosialisasi mengenai tujuan bantuan dan persyaratan pengambilan. Informan penerima menjelaskan bahwa bantuan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak serta sebelum pencairan warga memperoleh penjelasan mengenai tujuan bantuan. Komunikasi

tersebut mengurangi jarak informasi antara aparaturnya dan warga. Dalam perspektif Bourdieu, pengetahuan mengenai aturan dapat dipahami sebagai bentuk modal budaya yang membantu warga menavigasi arena bantuan sosial.

Namun, peran pemerintah tidak dapat dipahami sebagai sepenuhnya tanpa masalah. Penelitian menemukan keterbatasan anggaran dan keterbatasan cakupan penerima. Suhar menjelaskan bahwa pemerintah desa telah memaksimalkan calon penerima sesuai kriteria, tetapi tidak semua warga dapat tercover karena keterbatasan anggaran dan aturan. Temuan ini penting karena persepsi ketidakadilan dapat muncul meskipun prosedur telah dijalankan. Dengan kata lain, prosedural fairness tidak selalu menghasilkan pengalaman yang sama bagi seluruh warga.

Pro dan Kontra Program BLT

BLT dipandang positif karena memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin pada saat kondisi ekonomi melemah. Bantuan menjadi jaring pengaman yang membantu rumah tangga mempertahankan konsumsi dasar. Akan tetapi, terdapat pula pro-kontra karena dana desa terbatas dan penggunaan anggaran untuk BLT dapat dipersepsikan mengurangi ruang fiskal bagi program lain seperti kesehatan, pendidikan, stunting, atau rumah layak huni. Selain itu, tidak semua rumah tangga miskin menerima bantuan karena adanya kriteria dan larangan menerima bantuan ganda.

Keterbatasan cakupan menjadi salah satu sumber kecemburuan sosial. Penelitian mencatat bahwa sebagian warga yang tidak menerima bantuan mempertanyakan keputusan pemerintah desa, terutama ketika mereka tidak memahami mekanisme penetapan penerima. Sebaliknya, warga yang memahami prosedur cenderung lebih dapat menerima keputusan. Temuan ini menegaskan bahwa transparansi harus disertai kemampuan komunikasi dan penjelasan mengenai alasan kebijakan.

Penelitian juga mencatat adanya perubahan jumlah penerima BLT dari 2020 sampai 2024 yang berkaitan dengan penerimaan bantuan sosial lain seperti PKH dan bantuan sembako. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa BLT merupakan bagian dari ekosistem perlindungan sosial, bukan satu-satunya program. Karena itu, pengelolaan bantuan perlu memperhatikan kemungkinan tumpang tindih dan koordinasi antarpogram.

Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi merupakan temuan yang paling langsung. Penerima bantuan menggunakan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli bahan makanan, dan membayar keperluan pendidikan anak. Fajriatul menyampaikan bahwa BLT membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah, terutama pada masa ketika aktivitas ekonomi melemah. Suhar juga menegaskan bahwa manfaat bantuan terlihat pada pemenuhan kebutuhan pokok dan biaya pendidikan. Temuan tersebut menunjukkan fungsi konsumsi dasar dari transfer tunai.

Namun, kemampuan BLT untuk meningkatkan kapasitas ekonomi jangka panjang terbatas. Penelitian menyebut nominal yang diterima relatif kecil sehingga lebih banyak digunakan untuk kebutuhan mendasar dan belum cukup untuk pengembangan usaha atau peningkatan kualitas hidup dalam jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan argumen bahwa bantuan tunai dapat menjadi instrumen

perlindungan jangka pendek, tetapi pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan membutuhkan kombinasi transfer, pemberdayaan, kesempatan kerja, dan penguatan ekonomi lokal. Anam et al. (2023) juga menekankan bahwa dana desa memiliki potensi mengurangi kemiskinan, tetapi efektivitasnya dipengaruhi kapasitas dan desain tata kelola.

Jika dibaca melalui perspektif Marx, manfaat ekonomi BLT terlihat sebagai proses redistribusi sumber daya kepada kelompok yang lebih rentan. Negara melalui pemerintah desa mengintervensi distribusi agar rumah tangga miskin tidak semakin tertekan. Akan tetapi, redistribusi tersebut bersifat terbatas karena besarnya bantuan dan jumlah penerima dibatasi oleh aturan dan anggaran. Dengan demikian, BLT lebih tepat dipahami sebagai mekanisme perlindungan sosial daripada solusi struktural terhadap kemiskinan.

Dampak Sosial Budaya

Secara sosial, penerima merasakan manfaat dan menunjukkan rasa syukur, sementara nonpenerima dapat mengalami kecemburuan. Penelitian menemukan bahwa sebagian warga bahkan menyalahkan pemerintah desa ketika mereka tidak memperoleh bantuan. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan distribusi memiliki konsekuensi terhadap hubungan sosial. Ketika informasi tentang kriteria tidak merata, perbedaan akses terhadap bantuan dapat diterjemahkan sebagai ketidakadilan personal, bukan sebagai konsekuensi dari kebijakan yang memiliki kriteria.

Penelitian juga menemukan gejala budaya konsumtif dan kecenderungan sebagian masyarakat untuk berharap pada bantuan. Temuan tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Tidak semua penerima bersikap demikian, karena sebagian besar menggunakan bantuan untuk kebutuhan dasar. Namun, pengalaman penelitian menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan berulang dapat memengaruhi orientasi masyarakat terhadap sumber pendapatan dan status sosial. Dalam perspektif Bourdieu, bantuan dapat menciptakan arena baru tempat modal ekonomi dan simbolik diperebutkan. Status sebagai penerima dapat menjadi sumber akses sekaligus sumber ketegangan ketika akses tersebut dipersepsikan tidak merata.

Temuan mengenai kecemburuan juga menunjukkan bahwa modal sosial memiliki peran. Masyarakat desa memiliki hubungan kekerabatan dan interaksi yang relatif dekat, sehingga informasi tentang siapa yang menerima bantuan cepat beredar. Kondisi ini dapat memperkuat solidaritas jika informasi dianggap adil, tetapi juga memperkuat konflik jika keputusan dianggap tidak transparan. Karena itu, mekanisme musyawarah dan publikasi daftar penerima memiliki fungsi sosial selain fungsi administratif.

Dampak Keagamaan

Dalam ranah agama, penerima memaknai bantuan sebagai rezeki dan pertolongan yang patut disyukuri. Dana digunakan untuk kebutuhan keluarga dan pendidikan anak. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan terhadap program publik tidak hanya didasarkan pada kalkulasi ekonomi, tetapi juga dibingkai oleh nilai keagamaan masyarakat. Desa Anggaraksa merupakan masyarakat yang seluruh penduduknya dalam data desa beragama Islam dan memiliki aktivitas keagamaan yang kuat.

Pada saat yang sama, penelitian menunjukkan adanya penilaian moral mengenai ketepatan sasaran. Bantuan dipandang seharusnya diterima oleh mereka yang memenuhi kriteria. Jika bantuan diterima oleh pihak yang tidak berhak atau terjadi manipulasi data, tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan. Dengan demikian, nilai agama berfungsi sebagai mekanisme normatif yang memperkuat tuntutan terhadap integritas aparatur dan penerima. Perspektif ini memperlihatkan bahwa tata kelola bantuan di tingkat lokal berinteraksi dengan norma sosial-keagamaan yang telah hidup dalam masyarakat.

Dampak Politik dan Pemerintahan

Program bantuan sosial memiliki dimensi politik karena negara hadir secara langsung melalui distribusi sumber daya. Penelitian di Anggaraksa menemukan persepsi masyarakat bahwa BLT dapat dipolitisasi, terutama ketika penyaluran bantuan berdekatan dengan momentum pemilu. Suhar menyebut bahwa ketegangan sosial dapat terasa ketika penyaluran bantuan berbarengan dengan situasi politik. Namun, penelitian ini tidak mengukur secara kuantitatif pengaruh BLT terhadap pilihan politik. Temuan yang tersedia terutama menunjukkan persepsi dan pengalaman informan mengenai kemungkinan politisasi.

Dari sisi pemerintahan, BLT dapat memperkuat citra pemerintah ketika masyarakat merasakan manfaatnya. Bantuan dapat meningkatkan rasa bahwa pemerintah hadir dan memperhatikan kebutuhan warga. Sebaliknya, apabila terjadi kesalahan data atau komunikasi yang buruk, bantuan dapat menurunkan kepercayaan. Karena itu, legitimasi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh apakah bantuan diberikan, tetapi juga oleh bagaimana bantuan diberikan.

Temuan tersebut relevan dengan penelitian tentang tata kelola desa yang menempatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai fondasi kepercayaan publik. Anam et al. (2023) mengingatkan bahwa kapasitas administratif dan mekanisme koordinasi masih menjadi tantangan dalam pengelolaan dana desa. Dalam konteks Anggaraksa, pembentukan relawan, musyawarah, dokumentasi, dan pelaporan dapat dipahami sebagai mekanisme lokal untuk menjaga legitimasi. Namun, mekanisme tersebut perlu terus diperkuat agar persepsi politisasi tidak menggeser pemahaman masyarakat bahwa BLT adalah hak berbasis kriteria dan kebijakan publik, bukan pemberian personal dari penguasa.

Sintesis Sosiologis: Distribusi, Arena, dan Kepercayaan

Jika seluruh temuan disatukan, praktik pengelolaan BLT di Anggaraksa memperlihatkan tiga lapisan yang saling berhubungan. Lapisan pertama adalah struktur kebijakan, yaitu aturan pemerintah mengenai kriteria, sumber dana, mekanisme pendataan, dan pelaporan. Lapisan kedua adalah praktik institusional desa, yaitu musyawarah, relawan, verifikasi, publikasi, penyaluran, dan pelaporan. Lapisan ketiga adalah respons sosial masyarakat berupa rasa terbantu, syukur, kecemburuan, kritik, dan persepsi terhadap pemerintah. Hubungan ketiga lapisan tersebut menjelaskan mengapa kualitas manajemen tidak dapat dinilai hanya dari ketepatan prosedur.

Dalam perspektif Marx, BLT merupakan mekanisme redistribusi yang diarahkan pada kebutuhan kelompok rentan. Dalam perspektif Bourdieu, distribusi tersebut berlangsung di dalam arena yang memiliki aturan, posisi aktor, dan bentuk modal yang berbeda. Pemerintah memiliki modal administratif dan

simbolik, sementara warga memiliki modal sosial dan pengetahuan lokal. Musyawarah menjadi ruang pertemuan berbagai modal tersebut. Transparansi kemudian berfungsi sebagai mekanisme untuk mengubah keputusan administratif menjadi keputusan yang dapat diterima secara sosial.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan BLT di Anggaraksa relatif baik dalam aspek prosedural: terdapat tim relawan, musyawarah, verifikasi, validasi, penyaluran, dan pelaporan. Akan tetapi, praktik tersebut tetap menghasilkan dampak yang ambivalen. Bantuan mengurangi beban ekonomi tetapi dapat memunculkan kecemburuan; memperkuat rasa diperhatikan pemerintah tetapi juga membuka persepsi politisasi; dan memperkuat solidaritas melalui musyawarah tetapi sekaligus memperlihatkan ketegangan akibat keterbatasan cakupan. Ambivalensi tersebut merupakan karakter penting kebijakan sosial di tingkat lokal.

Implikasinya adalah bahwa peningkatan kualitas BLT tidak cukup dilakukan dengan menambah dana. Pemerintah desa juga perlu memperkuat kualitas data, mekanisme pengaduan, komunikasi publik, dan koordinasi dengan program sosial lain. Warga perlu memperoleh penjelasan yang mudah dipahami mengenai kriteria dan alasan tidak menerima bantuan. Pengawasan masyarakat juga perlu dipertahankan agar transparansi tidak berhenti pada dokumentasi administratif. Dengan cara tersebut, BLT dapat lebih efektif sebagai perlindungan sosial sekaligus tetap menjaga hubungan sosial dan kepercayaan masyarakat.

Transparansi sebagai Praktik Sosial

Salah satu temuan penting penelitian adalah bahwa transparansi tidak berdiri sebagai tindakan administratif yang terpisah dari kehidupan sosial. Pemerintah desa menggunakan musyawarah, pengumuman, pelibatan tokoh masyarakat, dan dokumentasi sebagai cara untuk menjelaskan bahwa keputusan mengenai penerima BLT tidak dibuat secara tertutup. Transparansi dalam konteks ini bekerja melalui komunikasi yang berulang. Masyarakat bukan hanya membutuhkan daftar nama, tetapi juga membutuhkan penjelasan mengenai kriteria, sumber data, tahapan verifikasi, serta alasan mengapa sebagian warga belum dapat menerima bantuan.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa pemahaman warga terhadap mekanisme menjadi pembeda dalam respons sosial. Warga yang memahami bahwa anggaran dan kriteria penerima terbatas cenderung menerima keputusan lebih baik, sedangkan warga yang kurang memperoleh informasi dapat memandang ketidakmenerimaan sebagai bentuk ketidakadilan. Karena itu, transparansi harus dipahami sebagai proses membangun pemahaman bersama. Prinsip tersebut sejalan dengan temuan penelitian tata kelola desa yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dari sudut pandang Bourdieu, kemampuan memahami prosedur dapat dipandang sebagai modal budaya yang tidak tersebar secara merata. Aparatur desa memiliki pengalaman administratif, sedangkan sebagian warga, terutama kelompok lanjut usia, menghadapi keterbatasan teknologi dan informasi. Skripsi menemukan bahwa sebagian penerima mengalami kesulitan mengoperasikan ATM sehingga pemerintah desa perlu berkoordinasi dengan pihak bank. Respons tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik yang efektif membutuhkan adaptasi terhadap kondisi sosial warga, bukan sekadar penerapan prosedur secara kaku.

Keadilan Distribusi dan Batasan Program

Keadilan distribusi dalam program BLT memiliki karakter selektif. Pemerintah tidak dapat membagi dana secara sama rata kepada seluruh penduduk karena program ditujukan kepada kelompok yang memenuhi kriteria. Di Desa Anggaraksa, keterbatasan anggaran bahkan menyebabkan sebagian warga yang merasa membutuhkan tidak dapat tercover. Situasi ini memperlihatkan perbedaan antara equality dan equity: pembagian yang adil bukan berarti setiap warga menerima jumlah yang sama, tetapi sumber daya diarahkan kepada kelompok yang memenuhi kriteria kebutuhan.

Namun, prinsip tersebut baru dapat diterima apabila kriteria dan proses penetapannya dipercaya. Di sinilah persoalan data menjadi sangat penting. Data kemiskinan dapat berubah, sementara daftar administratif tidak selalu bergerak secepat perubahan kondisi rumah tangga. Praktik door to door yang dilakukan pemerintah desa menjadi upaya untuk memperbarui informasi faktual. Pendekatan tersebut memperlihatkan pentingnya menggabungkan data administratif dengan pengetahuan lapangan. Dengan kombinasi itu, kemungkinan salah sasaran dan tumpang tindih bantuan dapat ditekan.

Batasan program juga terlihat dari penggunaan dana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bantuan terutama digunakan untuk konsumsi dasar dan pendidikan anak. Hal tersebut merupakan keberhasilan penting dalam fungsi perlindungan sosial, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa transfer tunai tidak otomatis mengubah struktur kemiskinan. Ketika pendapatan rumah tangga tetap rendah dan kesempatan kerja terbatas, bantuan hanya memberikan ruang bernapas. Karena itu, program perlindungan sosial idealnya terhubung dengan pemberdayaan ekonomi, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja agar manfaatnya tidak berhenti pada konsumsi jangka pendek.

KESIMPULAN

Praktik manajemen pengelolaan BLT di Desa Anggaraksa pada saat penelitian telah dilaksanakan melalui tahapan yang relatif sistematis, mulai dari musyawarah desa, pembentukan relawan, pendataan berbasis DTKS dan pendataan lapangan, verifikasi, validasi, penetapan, publikasi, penyaluran, sampai pelaporan. Keterlibatan BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala dusun, RT/RW, dan masyarakat memperlihatkan bahwa pengelolaan bantuan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membutuhkan partisipasi sosial. Transparansi dan komunikasi menjadi unsur penting untuk membangun penerimaan masyarakat terhadap keputusan pemerintah desa.

Dampak BLT bersifat multidimensional. Secara ekonomi, bantuan membantu memenuhi kebutuhan pokok dan biaya pendidikan anak, tetapi nilainya terbatas untuk pengembangan usaha jangka panjang. Secara sosial budaya, penerima merasa terbantu dan bersyukur, sedangkan sebagian nonpenerima mengalami kecemburuan dan kritik terhadap pemerintah desa. Secara keagamaan, bantuan dimaknai sebagai rezeki dan amanah yang harus disalurkan kepada pihak yang berhak. Secara politik, terdapat persepsi mengenai kemungkinan politisasi bantuan, terutama ketika penyaluran berdekatan dengan momentum pemilu, meskipun penelitian ini tidak mengukur dampak elektoral secara kuantitatif.

Secara sosiologis, praktik BLT menunjukkan bahwa kebijakan redistributif selalu berinteraksi dengan struktur sosial lokal. Aturan formal menjadi efektif ketika diterjemahkan melalui musyawarah, komunikasi, pengetahuan lokal, dan

mekanisme pertanggungjawaban yang dapat dipahami warga. Karena itu, penguatan pengelolaan BLT sebaiknya diarahkan pada pemutakhiran data, transparansi informasi, penguatan kanal pengaduan, koordinasi antarbantuan sosial, dan pengawasan partisipatif. Langkah tersebut penting agar bantuan tidak hanya tepat sasaran secara administratif, tetapi juga diterima sebagai praktik keadilan sosial yang legitimate di mata masyarakat.

REFERENSI

- Anam, C., Plaček, M., Valentinov, V., & Del Campo, C. (2023). Village funds and poverty reduction in Indonesia: New policy insight. *Discover Global Society*, 1, 14. <https://doi.org/10.1007/s44282-023-00016-6>
- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., & Dinar, M. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79, 382-394.
- Febriadi, A. (2022). Pengelolaan BLT Dana Desa dalam penanggulangan dampak Covid-19 di Kepenghuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020. *Jurnal*, 9(11).
- Fitriani, A. D., Iriani, N. I., & Susanti, R. A. D. (2021). Analisis pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) untuk masyarakat Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang terdampak pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(2), 203-212.
- Hariandja, T. R., & Budiman, N. T. (2020). Transparansi dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, 2(2), 264-287.
- Hasanah, N., & Yanto, H. (2021). Efektivitas pelatihan keuangan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dana desa. *Business and Accounting Education Journal*, 2(2), 219-234. <https://doi.org/10.15294/baej.v2i2.50650>
- Iping, B. (2020). Perlindungan sosial melalui kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di era pandemi Covid-19: Tinjauan perspektif ekonomi dan sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(2), 516-526.
- Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., Rahman, A. B., Samosir, A. P., & Wardhana, I. W. (2021). The village fund program in Indonesia: Measuring the effectiveness and alignment to sustainable development goals. *Sustainability*, 13(21), 12294. <https://doi.org/10.3390/su132112294>
- Putri, C. M., Argilés-Bosch, J. M., & Ravenda, D. (2024). Creating good village governance: An effort to prevent village corruption in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 31(2), 455-468. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2022-0266>
- Safitri, W., & Respati, N. W. (2023). Factors influencing accounting fraud in village fund management in South Kalimantan. *Accounting Analysis Journal*, 12(3), 155-164. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v12i3.68933>
- Saibani, A. (2014). Pedoman umum penyelenggaraan pemerintahan desa. Media Pustaka.

- Sofyani, H., Pratolo, S., & Saleh, Z. (2021). Do accountability and transparency promote community trust? Evidence from village government in Indonesia. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 18(3), 397-418. <https://doi.org/10.1108/JAOC-06-2020-0070>
- Terry, G. R. (2012). *Prinsip-prinsip manajemen*. Bumi Aksara.